

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

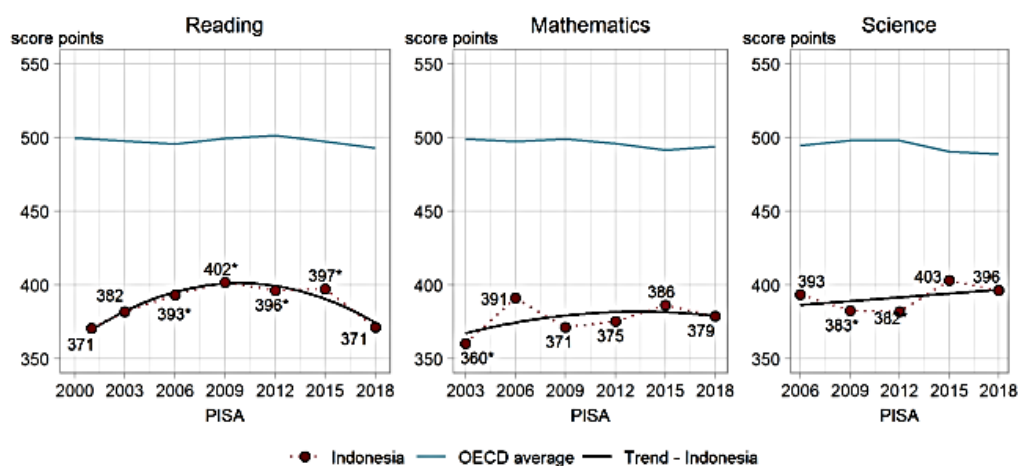
### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian (Wikipedia 2023). Pendidikan merupakan modal penting bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Terlebih lagi di era otonomi daerah, ketersediaan SDM terdidik sangat menentukan kemampuan daerah untuk berdaya saing dengan daerah lainnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, masyarakat harus diberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, membagi jalur pendidikan menjadi tiga, yakni pendidikan Formal, Non Formal dan Informal. Sedangkan dari jenjang pendidikannya, dibagi menjadi lima jenjang yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi (PT). Dengan adanya akses pendidikan yang mudah dijangkau, maka peluang masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi semakin terbuka luas, tanpa memandang status sosial dan ekonominya. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga merata, namun yang terjadi di Indonesia adalah ketidakmerataannya pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Menurut Tola dan Tilaar dalam jurnal (Tjalla 2010), berdasarkan dari berbagai hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan beberapa tahun yang lalu, tidak ada satu pun juga universitas di Indonesia yang masuk kelompok 100 universitas di tingkat dunia, baru pada tahun-tahun terakhir ini, data memperlihatkan bahwa ITB, UGM dan UI menempati urutan ke 56, 61, dan 84 dari 100 universitas terbaik di Asia. Apabila kualitas pendidikan tinggi sudah demikian rendahnya bagaimana dengan pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, akhir-akhir ini yang menjadi pembicaraan adalah sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia yang dinilai kaku dan juga tidak efektif. Hal tersebut dapat kita lihat dari tertinggalnya kualitas pendidikan di Indonesia dalam survei *Program for International Student Assessment (PISA)* Indonesia 2018 dalam membaca, matematika dan sains.



**Gambar 1.1**

### Survei Skor PISA Indonesia dalam Membaca, Matematika dan Sains

*Sumber: Oecd.org/pisa/data/ (2018)*

Jika dilihat dari survei PISA rentan perkembangan skor membaca, matematika dan sains Indonesia tidak mencapai rata-rata skor PISA. Berdasarkan data PISA tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-75 dari 79 negara dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan sains.

Selain dari data survei PISA, kualitas pendidikan Indonesia juga terlihat dari angka buta huruf di Indonesia yang cukup tinggi. Buta huruf atau juga biasa disebut dengan buta aksara dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan untuk menggunakan bahasa dalam mendengar perkataan, mengerti suatu bacaan, ataupun mengungkapkan dalam bentuk lisan dan tulis (Lailiyah dan Purhadi 2012). Sedangkan, menurut (Syahputra 2014). Buta aksara adalah suatu ketidakmampuan seseorang untuk menulis, membaca dan berhitung dalam fungsi efektif dan perkembangan individu serta masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penduduk Buta Huruf di Indonesia**

Provinsi	Persentase Penduduk Buta Huruf (Persen)								
	15+			15-44			45+		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
ACEH	1.75	1.76	1.75	0.07	0.06	0.13	5.53	5.32	4.96
SUMATERA UTARA	0.84	0.81	0.89	0.20	0.17	0.24	2.09	2.03	2.11
SUMATERA BARAT	0.83	0.74	0.71	0.12	0.10	0.12	2.04	1.92	1.70
RIAU	0.77	0.80	0.82	0.09	0.09	0.07	2.37	2.38	2.42
JAMBI	1.81	1.92	1.90	0.26	0.24	0.18	4.91	4.88	5.14
SUMATERA SELATAN	1.25	1.22	1.35	0.23	0.20	0.27	3.25	3.15	3.28
BENKULU	1.99	2.12	2.20	0.19	0.16	0.25	5.64	5.63	5.87
LAMPUNG	2.76	2.72	2.75	0.12	0.11	0.28	7.43	7.09	6.91
KEP. BANGKA BELITUNG	1.92	1.90	1.83	0.68	0.64	0.42	4.43	4.19	4.52
KEP. RIAU	1.00	0.91	0.98	0.14	0.11	0.15	3.25	2.87	2.85
DKI JAKARTA	0.31	0.27	0.31	0.10	0.09	0.08	0.71	0.61	0.68
JAWA BARAT	1.37	1.38	1.51	0.13	0.12	0.13	3.55	3.56	3.93
JAWA TENGAH	6.38	6.21	5.74	0.30	0.25	0.74	14.32	14.09	12.78
DI YOGYAKARTA	4.91	4.78	4.85	0.06	0.07	0.22	11.26	10.94	10.34
JAWA TIMUR	7.50	7.44	6.68	1.00	0.94	0.94	16.00	15.62	14.28
BANTEN	2.12	2.22	1.84	0.13	0.14	0.33	6.45	6.16	4.86
BALI	5.20	5.00	4.47	0.13	0.09	0.40	12.55	12.08	9.92
NUSA TENGGARA BARAT	12.40	12.61	11.03	2.82	2.70	2.79	30.94	30.38	26.75
NUSA TENGGARA TIMUR	6.69	6.15	5.37	2.73	2.13	1.75	14.56	13.79	12.30
KALIMANTAN BARAT	6.59	6.59	6.04	1.58	1.43	1.46	16.75	16.47	14.92

Provinsi	Persentase Penduduk Buta Huruf (Persen)								
	15+			15-44			45+		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KALIMANTAN TENGAH	0.80	0.90	0.88	0.12	0.09	0.08	2.33	2.45	2.50
KALIMANTAN SELATAN	1.55	1.73	1.64	0.17	0.15	0.24	4.17	4.29	4.20
KALIMANTAN TIMUR	1.03	1.10	1.03	0.20	0.14	0.24	2.78	2.80	2.59
KALIMANTAN UTARA	3.34	3.45	2.29	0.72	0.61	0.77	9.23	8.93	5.48
SULAWESI UTARA	0.21	0.20	0.19	0.10	0.09	0.07	0.37	0.35	0.34
SULAWESI TENGAH	1.76	1.72	1.95	0.71	0.67	0.58	3.78	3.62	4.57
SULAWESI SELATAN	7.44	7.51	6.69	1.88	1.71	1.77	17.13	16.78	15.08
SULAWESI TENGGARA	5.00	5.06	4.21	1.16	1.10	0.82	13.29	13.07	11.21
GORONTALO	1.25	1.25	1.58	0.34	0.28	0.60	3.05	2.97	3.41
SULAWESI BARAT	6.83	6.91	6.18	3.08	2.67	1.85	15.28	15.19	15.40
MALUKU	0.58	0.58	0.60	0.55	0.52	0.31	0.66	0.70	1.19
MALUKU UTARA	1.23	1.29	1.22	0.29	0.26	0.16	3.44	3.43	3.57
PAPUA BARAT	2.48	2.09	2.36	1.82	1.39	0.98	4.27	3.86	5.65
PAPUA	22.10	21.11	18.81	20.38	19.03	15.09	26.95	26.28	28.35
INDONESIA	4.00	3.96	3.65	0.80	0.73	0.75	9.46	9.24	8.48

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)*

Berdasarkan Tabel 1.1, BPS mencatat secara umum ada 3,65% penduduk dewasa atau yang berusia 15 tahun ke atas buta huruf di Indonesia pada 2022. Sekitar empat dari 100 penduduk dewasa di Indonesia mengalami buta huruf pada tahun 2022. Ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa 3,65% penduduk berusia 15 tahun ke atas di Indonesia buta huruf pada tahun 2022. Menurut kelompok usia 15-44 tahun, persentase penduduk buta huruf di Indonesia hanya sebesar 0,75%. Sedangkan, persentase penduduk buta huruf yang

berusia di atas 45 tahun sebesar 8,48%. Berdasarkan wilayahnya, penduduk dewasa Papua paling banyak yang buta huruf, yakni 18,81%. Posisinya diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dengan 11,03% penduduk dewasanya masih buta huruf. Kemudian, ada 6,69% penduduk dewasa di Sulawesi Selatan yang buta huruf. Sementara, angka buta huruf di Jawa Timur dan Sulawesi Barat masing-masing sebesar 6,68% dan 6,18%.

Pendidikan yang memadai di Indonesia memang belum merata, pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup, sehingga dapat mendorong setiap individunya untuk berkembang dan maju. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari angka putus sekolah di Indonesia yang masih cukup tinggi. Menurut Ary H Gunawan, 2010 dalam jurnal (Widianingsih Leni i, Hasyim and Nurmalisa n.d.) Putus Sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya.

**Tabel 1.2**  
**Angka Anak Putus Sekolah**

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin								
	SD / Sederajat			SMP / Sederajat			SMA / Sederajat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Laki-laki	0.72	0.75	0.80	8.42	7.56	7.77	23.57	23.14	24.56
Perempuan	0.52	0.55	0.62	6.08	5.96	6.06	21.00	19.76	20.35
Laki-laki + Perempuan	0.62	0.65	0.71	7.29	6.77	6.94	22.31	21.47	22.52

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)*

Dilihat pada Tabel 1.2 jumlah persentase anak putus sekolah menaik pada tahun 2022, berdasarkan jenjang pendidikan pada jenjang SD/Sederajat mengalami kenaikan sebesar 0,6%, kemudian pada jenjang SMP/Sederajat kenaikan angka

putus sekolah di tahun 2022 sebesar 0,77% sementara itu jenjang pendidikan SMA/Sederajat masih cukup tinggi yakni 22,52.

Selain skor PISA, angka buta huruf dan tingkat putus sekolah, indikator lainnya untuk mengukur kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu, dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi masyarakat secara umum disuatu jenjang pendidikan, semakin tinggi nilai APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi daya jangkau masyarakat dalam mengakses pendidikan ke semua jenjang pendidikan, maka tentunya akan semakin tinggi pula nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di daerah tersebut.

**Tabel 1.3**  
**Data Angka Partisipasi Kasar Pendidikan di Indonesia**

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	SD/MI/ Paket A			SMP/Mts/ Paket B			SMA/SMK/MA/ Paket C		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Aceh	11385	10993	10870	9930	9742	9779	8480	9009	9090
Sumatera Utara	11110	10949	10853	8598	9038	9168	9157	9404	9468
Sumatera Barat	11099	10931	10868	9092	9141	9233	8397	8888	9001
Riau	10692	10681	10589	9419	9395	9489	8387	8417	8461
Jambi	111598	11111	10939	8155	8731	8891	7893	8250	8371
Sumatera Selatan	11414	11330	11158	8651	8697	8878	7740	8085	8173
Bengkulu	11353	10998	10922	9208	8950	9132	8557	9580	9414
Lampung	11011	10136	10593	9418	9111	9256	8156	8573	8584
Kep. Bangka Belitung	11115	10844	10743	8593	8534	8819	8221	8711	8715
Kep. Riau	10130	101454	10631	9244	9282	9397	9099	8669	8753
DKI Jakarta	10527	10483	10343	9491	9102	9174	7398	7477	7687
Jawa Barat	10624	10552	10472	9096	9075	9175	7531	7782	7826
Jawa Tengah	10818	10174	10632	9196	9170	9321	8415	8676	8683

Provinsi	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	SD/MI/ Paket A			SMP/Mts/ Paket B			SMA/SMK/MA/ Paket C		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
DI Yogyakarta	10584	10618	10596	9698	9500	9544	8743	89,07	8930
Jawa Timur	10669	10556	10435	9453	81,43	9640	7911	8480	8524
Banten	109,50	10193	10724	9171	9161	9276	7170	7292	7335
Bali	10302	10352	10287	9614	9726	9740	8774	8796	8867
Nusa Tenggara Barat	10882	10850	10702	9383	9207	9359	8964	9086	9177
Nusa Tenggara Timur	11658	11495	11340	8851	8182	8985	7781	8463	8470
Kalimantan Barat	11697	11258	11153	8304	8326	8522	7925	8249	8451
Kalimantan Tengah	11002	11005	10849	9579	8874	9061	7483	8227	8229
Kalimantan Selatan	11021	10869	10728	8617	8383	8631	7568	78,86	7910
Kalimantan Timur	10802	10684	10575	9257	9103	9217	9608	9496	9523
Kalimantan Utara	10231	10117	10054	10295	9825	10147	8923	9791	9831
Sulawesi Utara	10902	10817	10662	8847	8922	9063	8225	8660	8683
Sulawesi Tengah	10528	10513	10395	9288	9063	9198	8353	8735	8842
Sulawesi Selatan	11028	10845	10685	8697	8422	8623	8174	8609	8644
Sulawesi Tenggara	11081	10925	10797	8523	8534	8710	8483	8681	8774
Gorontalo	11195	11088	10948	8017	7895	7925	8425	8864	8865
Sulawesi Barat	10856	10132	10605	8236	8271	8467	8448	8410	8436
Maluku	11225	11219	11008	9558	9040	9108	8715	95,20	9595
Maluku Utara	11374	10973	10871	9110	8653	8828	8804	9317	9344
Papua Barat	110722	11124	11017	8568	8849	9079	9074	9641	9772
Papua	9447	9194	9127	8181	7811	8124	6507	7633	7655
Indonesia	10861	10146	10632	9152	9057	9206	8068	8398	8453

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2017-2020)*

Jika dilihat dari Tabel 1.3 data APK di Indonesia selama 2 tahun terakhir masih belum menunjukkan perubahan yang baik. Kesenjangan terlihat pada data APK Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat yang merupakan provinsi terdekat dengan ibu kota negara, ternyata memiliki APK yang lebih rendah dibanding NTB. APK di Jawa Barat masih tergolong rendah, khususnya pada APK SMA/SMK. APK Provinsi Jawa Barat hanya mencapai 52%, sementara target nasionalnya 68%. APK Jawa Barat juga menduduki ranking ke 31

dari 33 Provinsi, Jawa Barat berada dibawah Provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Barat. APK Jawa Barat juga masih terbilang jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Papua dan provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa.

**Tabel 1.4**  
**Data APK di Jawa Barat Pada Tahun 2017-2019**

Wilayah Jawa Barat	Angka Partisipasi Kasar											
	SD/MI/Paket A			SMP/MTS/Paket B			SMA/MA/Paket C			Perguruan Tinggi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Barat	107.54	106.24	105.52	88.80	90.96	90.75	76.48	75.31	77.82	21.42	20.93	21.09
Bogor	112.02	107.91	106.01	81.72	84.12	86.49	72.94	62.76	62.39	24.54	26.63	25.02
Sukabumi	106.40	110.02	107.24	90.71	92.15	87.89	67.26	60.98	69.16	10.42	10.40	10.06
Cianjur	108.70	106.09	103.65	88.11	93.65	94.11	60.03	58.66	61.74	7.26	6.44	5.99
Bandung	107.47	105.33	105.14	83.26	93.23	89.99	75.89	66.16	63.74	17.22	19.56	20.27
Garut	110.44	106.15	105.77	89.69	86.01	90.42	64.77	71.80	68.58	12.32	10.02	9.70
Tasikmalaya	107.47	103.62	104.44	94.41	93.69	97.65	62.62	65.23	70.82	15.56	15.81	15.71
Ciamis	102.21	104.45	104.44	101.42	101.28	101.76	67.75	57.62	120.80	17.89	17.93	16.94
Kuningan	106.95	99.65	100.35	88.60	88.74	96.43	75.25	79.12	77.40	15.86	15.38	16.76
Cirebon	107.90	104.53	106.61	89.19	88.04	90.24	72.27	84.34	83.20	19.74	13.91	14.71
Majalengka	104.19	105.01	106.14	89.96	91.02	92.41	84.60	75.42	75.25	16.14	10.77	12.44
Sumedang	109.33	104.34	107.80	96.60	114.49	109.28	54.42	46.30	51.19	23.50	23.90	24.25
Indramayu	108.85	109.28	106.69	86.00	86.72	85.90	72.85	72.59	67.43	10.96	9.03	13.24
Subang	102.57	104.69	103.95	88.76	96.14	92.46	67.44	67.55	70.69	12.00	8.60	6.99
Purwakarta	107.68	110.45	106.70	77.85	93.61	84.76	75.78	72.50	83.25	15.63	10.70	12.04
Karawang	106.65	107.66	105.91	87.46	86.32	87.86	75.05	76.41	81.57	13.14	14.79	12.33
Bekasi	107.69	105.12	107.66	92.33	99.53	91.60	100.62	88.80	91.19	21.44	23.39	23.45
Bandung Barat	107.34	103.94	104.22	87.55	93.88	90.66	73.04	62.42	65.88	13.05	13.94	12.17
Pangandaran	106.57	99.55	104.53	84.88	95.84	94.64	83.32	91.24	85.83	9.43	6.53	6.73
Kota Bogor	107.76	103.19	103.40	86.82	87.32	85.53	87.79	73.49	80.94	38.00	31.31	33.70
Kota Sukabumi	106.88	108.62	105.76	82.88	89.46	96.78	90.41	81.78	87.08	27.47	28.91	28.85
Kota Bandung	104.56	106.89	102.93	89.61	86.68	86.26	85.38	93.33	94.90	44.82	42.55	41.80
Kota Cirebon	105.38	110.47	107.79	79.19	89.46	84.81	92.99	74.78	87.40	15.97	15.84	21.29
Kota Bekasi	108.61	108.85	109.06	95.91	95.72	97.17	90.83	115.68	107.42	31.94	29.82	32.65
Kota Depok	102.33	109.43	103.17	101.86	83.76	84.36	89.30	103.06	105.89	34.99	36.61	37.23
Kota Cimahi	105.58	98.37	105.83	82.04	88.79	89.54	91.89	87.08	103.84	28.27	25.49	28.77



Wilayah Jawa Barat	Angka Partisipasi Kasar											
	SD/MI/Paket A			SMP/MTS/Paket B			SMA/MA/Paket C			Perguruan Tinggi		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Kota Tasikmalaya	103.06	99.59	100.48	92.02	92.21	96.18	91.06	92.42	79.46	22.92	19.63	19.64
Kota Banjar	102.74	105.57	104.17	87.64	87.77	89.31	103.32	86.90	88.72	16.48	17.63	17.07

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan Tabel 1.4 terjadi penurunan angka APK di Jawa Barat pada tahun 2019. Menurut data BPS, pendidikan pada jenjang SD/MI/Paket A terus mengalami penurunan dari tahun 2017, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/Paket B mengalami penurunan angka APK di tahun 2019 sebesar 0,21%.

**Tabel 1.5**

**Data APK di Jawa Barat Pada Tahun 2020-2022**

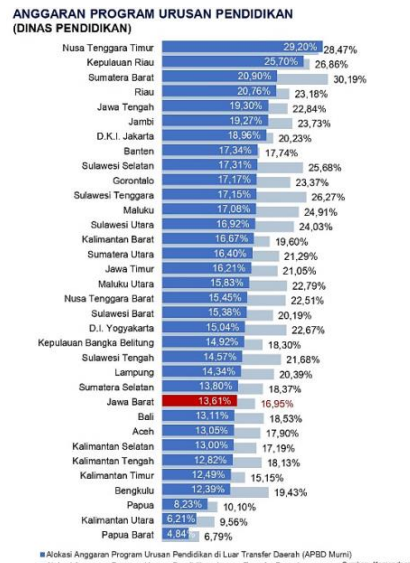
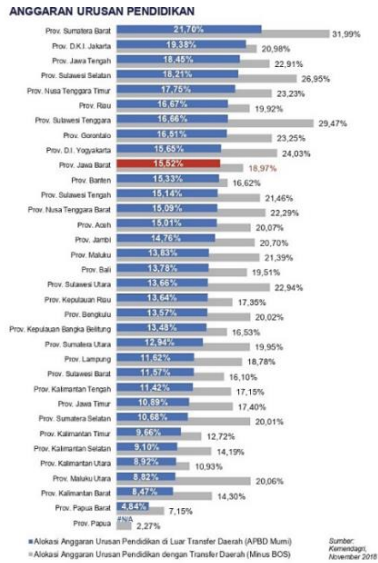
Wilayah Jawa Barat	Angka Partisipasi Kasar											
	SD/MI/Paket A			SMP/MTS/Paket B			SMA/MA/Paket C			Perguruan Tinggi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	-	104.57	104.55	-	93.33	93.46	-	78.10	78.86	-	21.65	22.11
Bogor	104.44	104.64	105.03	88.11	92.02	97.78	61.95	64.13	66.54	-	25.42	25.96
Sukabumi	107.41	107.84	107.79	88.03	88.19	94.21	70.24	71.28	71.15	-	10.57	15.96
Cianjur	102.10	102.46	102.66	95.89	95.85	97.80	62.14	61.51	62.88	-	7.03	13.91
Bandung	103.48	103.69	102.90	90.65	95.77	97.05	62.99	64.84	65.05	-	22.17	26.31
Garut	105.67	106.23	106.54	91.06	89.99	99.60	69.60	69.51	69.52	-	10.25	14.51
Tasikmalaya	106.82	105.37	105.15	95.76	97.39	103.19	72.10	70.50	71.01	-	16.03	19.38
Ciamis	107.96	106.42	106.63	107.75	106.69	105.76	116.80	114.29	113.03	-	17.55	38.65
Kuningan	98.60	100.72	101.70	97.63	96.55	80.53	78.03	79.03	77.93	-	15.41	18.42
Cirebon	104.64	103.99	103.58	95.00	97.78	93.52	82.30	80.78	83.13	-	11.72	16.69
Majalengka	104.85	105.81	104.03	93.00	91.24	91.20	75.14	72.50	74.65	-	15.87	14.78
Sumedang	107.93	107.03	102.67	110.40	111.75	105.29	54.57	52.97	65.30	-	24.62	28.54
Indramayu	105.09	104.02	104.32	88.27	91.94	86.40	69.79	71.46	73.77	-	14.84	16.25
Subang	102.08	102.79	102.67	93.39	93.61	106.24	71.92	71.25	71.86	-	6.86	12.26
Purwakarta	104.82	104.32	104.33	85.88	93.27	78.85	82.11	80.93	81.83	-	10.16	18.53
Karawang	104.00	103.63	103.52	88.29	89.49	89.00	81.72	79.97	80.97	-	12.58	19.65
Bekasi	107.16	107.14	106.88	92.62	94.11	88.52	92.07	90.35	93.13	-	24.96	30.78
Bandung Barat	104.53	102.99	104.84	90.99	91.38	93.97	67.00	65.42	64.63	-	13.78	16.61
Pangandaran	102.81	103.54	103.60	95.72	94.59	85.57	83.94	84.79	84.31	-	11.05	15.30
Kota Bogor	103.58	101.44	100.98	84.61	86.69	82.00	82.41	80.96	80.82	-	33.19	41.77
Kota Sukabumi	104.17	103.61	105.05	94.76	96.71	87.65	88.02	90.37	91.78	-	31.25	34.10
Kota Bandung	103.06	102.24	102.34	87.13	88.46	88.44	95.41	95.40	93.50	-	41.09	48.70

Wilayah Jawa Barat	Angka Partisipasi Kasar											
	SD/MI/Paket A			SMP/MTS/Paket B			SMA/MA/Paket C			Perguruan Tinggi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kota Cirebon	106.17	105.32	105.40	85.64	84.60	80.67	87.12	87.01	87.37	-	22.64	25.57
Kota Bekasi	108.99	110.25	110.21	98.40	97.03	91.30	105.35	103.60	105.12	-	35.83	42.92
Kota Depok	101.29	100.06	100.54	85.27	83.51	86.47	105.14	102.64	101.06	-	35.74	42.85
Kota Cimahi	104.28	102.81	102.54	91.14	89.74	83.03	101.66	99.60	101.25	-	29.03	33.79
Kota Tasikmalaya	100.66	99.28	101.67	94.29	103.13	87.80	82.18	84.75	84.58	-	18.70	22.32
Kota Banjar	102.17	102.90	103.15	90.23	88.93	90.85	89.46	87.26	86.56	-	17.73	22.94

*Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)*

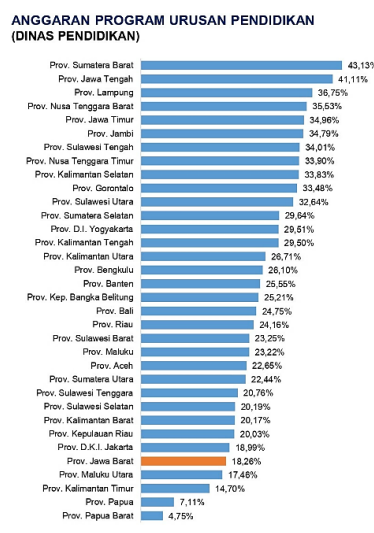
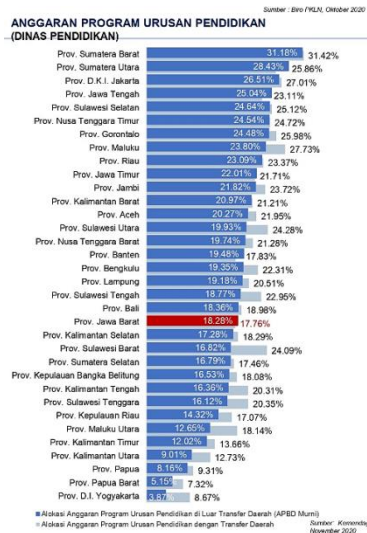
Sementara itu, berdasarkan Tabel 1.5 penurunan angka APK masih terlihat pada tahun 2022. Berdasarkan data BPS pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A angka APK di Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,02% namun terlihat peningkatan pada jenjang Pendidikan SMP/MTS/Paket B dan SMA/MA/Paket C masing-masing sebesar 0,13% dan juga 0,76%. Saat ini APK Jawa Barat hanya mencapai 18%, sementara provinsi lainnya diluar Jawabarot seperti Jawa Timur mencapai 30%.

Berdasarkan data tersebut, Jawa barat yang merupakan Provinsi yang letaknya dekat dengan ibu kota ternyata memiliki tingkat APK yang rendah dibanding Provinsi yang berada diluar pulau jawa. Padahal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2018-2023 di prioritaskan untuk pembangunan pada bidang Pendidikan. Selain dengan itu, apabila dilihat dari alokasi dana pendidikan, Jawa Barat ternyata mengalokasikan dana pendidikan yang cukup besar seperti yang terlihat pada Gambar 1.2.



Tahun Anggaran 2018

Tahun Anggaran 2019



Tahun Anggaran 2020

Tahun Anggaran 2021

Gambar 1.2  
Perkembangan Anggaran Pendidikan di Indonesia 2018-2021

Sumber: NPD Kemendikbud 2018,2019,2020,2021

Pada Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan anggaran pendidikan seluruh Provinsi di Indonesia selama 4 tahun. Apabila kita melihat data pada Gambar 1.2 Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran yang cukup tinggi untuk pendidikan. Anggaran yang diterima dari tahun 2018 hingga tahun 2021 cukup besar dibandingkan dengan Provinsi diluar pulau Jawa seperti Kalimantan Timur. Namun

jika dilihat dari data perkembangan APK, Kalimantan Timur memiliki tingkat capaian APK yang lebih tinggi dari Jawa Barat. Penulis melihat rendahnya APK di Jawa Barat tidak berbanding lurus dengan anggaran di Jawa Barat. Berikut merupakan data anggaran Pendidikan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2021.

**Tabel 1.6**  
**Data Anggaran Pendidikan Provinsi Jawa Barat**

Tahun Anggaran	Rincian Anggaran		Total Anggaran (a-b)
	Dana APBD (a)	Non Program Urusan Pendidikan (b)	
2018	Rp. 33.961,20 M	Rp. 19.386,36 M	Rp. 14.574,84 M
2019	Rp. 37.055,51 M	Rp. 22.120,9 M	Rp. 15.134,61 M
2020	Rp. 45,995.26 M	Rp. 28,535.9 M	Rp. 17,459.36 M
2021	Rp. 44.715,07 M	Rp. 26.153,8 M	Rp. 18.561,27 M

*Sumber: NPD Kemendikbud 2018,2019,2020,2021*

Berdasarkan Tabel 1.6 menunjukkan bahwa pendanaan pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan pendanaan pendidikan yang signifikan berdasarkan Tabel 1.6 yaitu terjadi pada tahun 2020. Menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat, alokasi untuk anggaran pendidikan akan diusulkan sebesar 33,21 persen dari total belanja daerah, namun persoalan yang dihadapi yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang di harapkan. Masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis meyakini perlu di teliti lebih lanjut karena APK di Jawa Barat rendah jika dibandingkan dengan APK di provinsi lain sementara pembiayaan pendidikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Jawa Barat naik dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Fenomena ini tentu saja menjadi permasalahan apakah tingkat APK yang rendah memiliki kaitannya dengan tingkat anggaran pendidikan yang naik dari tahun ke tahunnya. Oleh karena itu, penulis memilih untuk mengambil judul, "HUBUNGAN

TINGKAT PERSENTASE ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DENGAN TINGKAT Persentase Angka Partisipasi Kasar Pendidikan di Jawa Barat Pada Tahun 2018-2021”. Penulis ingin melakukan penelitian studi kasus mengenai hubungan tingkat APK dengan anggaran pendidikan dengan harapan agar hasil penelitian dapat memberikan informasi yang berguna bagi penulis maupun masyarakat.

Penelitian ini termasuk dalam kategori ekonomi pendidikan tentunya berkaitan dengan bidang studi Pendidikan Ekonomi karna dapat meneliti tingkat ekonomi dari segi anggaran dan dalam ranah pendidikan. Serta dalam penelitian ini meneliti apakah pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya, faktor pendukung berjalannya pendidikan di Indonesia dengan baik salah satunya dengan anggaran pendidikan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat APK di Jawa Barat di bandingkan dengan Provinsi lainnya. Saat ini Angka Partisipasi Kasar Pendidikan (APK) Jawa Barat hanya mencapai 18%, sementara provinsi lainnya diluar Jawabarat seperti Jawa Timur mencapai 30%.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan cukup tinggi. Pendanaan pendidikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan pendanaan pendidikan yang signifikan berdasarkan yaitu terjadi pada tahun 2020. Menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawabarat Alokasi untuk anggaran pendidikan akan diusulkan sebesar 33,21 persen dari total belanja daerah, namun persoalan yang dihadapi yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang di harapkan. Masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD.
3. Rendahnya APK di Jawa Barat tidak berbanding lurus dengan anggaran di Jawab Barat. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain diluar pulau Jawa, Jawa

Barat memiliki capaian APK yang rendah, namun anggaran pendidikan yang diterima oleh Jawa barat cukup tinggi dengan Provinsi lain diluar Pulau Jawa.

### **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1. Batasan masalah**

Berdasarkan fenomena yang diambil dan diidentifikasi, maka permasalahan dibatasi pada tingkat anggaran pendidikan pada tahun 2018-2021, perkembangan angka partisipasi kasar pendidikan (APK) pada tahun 2018-2021 dan hubungan tingkat anggaran pendidikan dengan angka partisipasi kasar pendidikan pada tahun 2018-2021.

#### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat persentase alokasi anggaran pendidikan di Jawa Barat pada tahun 2018-2021?
2. Bagaimana tingkat persentase angka partisipasi kasar pendidikan di Jawa Barat pada tahun 2018-2021?
3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat persentase alokasi anggaran pendidikan dengan persentase angka partisipasi kasar pendidikan di Jawa Barat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tertera sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat persentase alokasi anggaran pendidikan di Jawa Barat pada tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui tingkat persentase APK di Jawa Barat pada tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui hubungan tingkat persentase alokasi anggaran pendidikan dengan tingkat persentase angka partisipasi kasar pendidikan di Jawa Barat pada tahun 2018-2021.

## E. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) disuatu wilayah pada rentan waktu tertentu.

Secara khusus mampu digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan anatara anggaran pendidikan dengan angka partisipasi pendidikan (APK).

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian diatas, diharapkan manfaat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pandang manfaat teoritis atau akademis bagi pengembangan ilmu, penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan dunia pendidikan khususnya bagi penduduk usia pelajar. Saat ini Indonesia harus lebih memperhatikan pendidikan agar terciptanya sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas guna daya saing di industri *global*.
2. Manfaat praktis penelitian ini dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Dari data Angka partisipasi pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2021 yang bersumber dari Badan Pusat statistik terlihat penurunan dari tahun ke tahun. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan permasalahan tersebut dilihat dari faktor anggaran pendidikan.
  - a. Bagi mahasiswa  
Untuk mengetahui bagaimana anggaran pendidikan dari tahun 2018-2021 dan menganalisis hubungan anggaran pendidikan dengan angka partisipasi kasar. Apakah dengan perkembangan angka partisipasi kasar menurun terdapat hubungan nya dengan anggaran pendidikan
  - b. Bagi pendidik  
Melalui penelitian ini pendidik diharapkan dapat ikut andil mendukung peningkatan kenaikan tingkat angka partisipasi kasar pendidikan
  - c. Bagi peneliti  
Melalui penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan dan gambaran mengenai hubungan tingkat anggaran pendidikan dengan angka partisipasi kasar pada tahun 2018-2021.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk mengemukakan pembatasan dari istilah-istilah yang diberlakukan dalam penelitian serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam penelitian ini, dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Anggaran pendidikan**

(Nafarin 2013) menyatakan, “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (suatu jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintahan pusat merupakan alokasi anggaran pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau lembaga. Kementerian lembaga atau negara yang mendapat alokasi anggaran pendidikan bukan hanya kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian Agama tetapi juga kementerian negara atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah merupakan alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari komponen pembiayaan APBN berupa dana pengembangan pendidikan nasional. Dana pengembangan pendidikan nasional terdiri dari dana abadi pendidikan dan dana cadangan pendidikan.

### **2. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Menurut UNESCO dalam jurnal (Herlith, Aditya Pratama 2016), mendefinisikan *Gross Enrolment Ratio (GER)* atau Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai jumlah siswa yang terdaftar dalam tingkat pendidikan tertentu, tanpa memandang usia, dinyatakan sebagai persentase dari populasi usia sekolah resmi yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang sama. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi umumnya menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, baik siswa tersebut termasuk dalam kelompok usia sekolah resmi atau tidak resmi. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara



jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Mengacu pada jenjang pendidikan yang ada, APK dibagi menjadi APK SD, APK SMP, APK SMA. Tingkat APK yang tinggi mengartikan bahwa banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

## **G. Sistematika Skripsi**

Menurut Buku Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) FKIP Universitas Pasundan

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam buku panduan (2022, hlm. 37) yaitu: Pendahuluan bermaksud mengantarkan pembaca ke dalam pembahasan suatu masalah. Esensi dari bagian pendahuluan adalah pernyataan tentang masalah penelitian. Dengan membaca bagian pendahuluan, pembaca mendapat gambaran arah permasalahan dan pembahasan.

### **2. BAB II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran**

Dalam buku panduan (2022, hlm. 39) dijelaskan mengenai kajian teori dan kerangka pemikiran yaitu: Kajian teori berisi deskripsi teoritis yang ,e,fokuskan kepada hasil kajian atas teori, konsep, kebijakan dan peraturan yang ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan masalah penelitian. Kajian teori dilanjutkan dengan perumusan kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan dan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian.

### **3. BAB III Metode Penelitian**

Dalam buku panduan (2022, hlm. 41) dijelaskan mengenai metode penelitian yaitu: Bab ini menjelaskan secara sistematis dan terperinci langkah-langkah dan cara yang digunakan dalam menjawab permasalahan dan memperoleh kesimpulan. Bab ini berisi hal-hal seperti pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrument penelitian, teknis analisis data dan prosedur penelitian.

#### 4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam buku panduan (2022, hlm. 45) dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu: Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

#### 5. BAB V Simpulan dan Saran

Dalam buku panduan (2022, hlm. 47) dijelaskan bahwa simpulan merupakan uraian yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap analisis temuan hasil penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan, pengguna atau kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya dan kepada pemecah masalah di lapangan atau *follow up* dari hasil penelitian.